

KORELASI

Konferensi Riset Nasional Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi

Volume 2, 2021 | hlm. 806-821

ANALISIS DETERMINAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Alfino Fadhlurrahman^{1*}, Yoko Tristiarto², Ardhiani Fadila³
Alfino.f@upnvj.ac.id¹, Yoko.tristiarto@upnvj.ac.id², Fadilaardhiani@upnvj.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bermaksud mempelajari bagaimana Permodalan, Likuiditas, Inflasi, dan BI Repo Rate mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada BUS yang terdaftar di OJK periode 2015-2019. Kami memakai data sekunder dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan dengan teknik dokumentasi. Sebanyak 13 sampel yang diambil menggunakan sampling jenuh. Pengolahan data menggunakan analisis regresi data panel. Hasil pengolahan mengindikasikan Permodalan yang ditilik dari CAR berpengaruh negatif pada Pembiayaan Bermasalah (NPF). Likuiditas yang ditilik dari FDR tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF). Inflasi tidak berpengaruh pada Pembiayaan Bermasalah (NPF). BI Repo Rate tidak berpengaruh pada Pembiayaan Bermasalah (NPF).

Kata Kunci: Permodalan; Likuiditas; Inflasi; BI Repo Rate; dan Pembiayaan Bermasalah.

Abstract

This research suggests to learn the effects of Capital, Liquidity, Inflation, and the BI Repo Rate on Non-Performing Financing of Islamic commercial bank listed on the Financial Services Authority for the 2015-2019 period. We used secondary data from form of annual financial reports. We collected it by using documentation technique which is came from bank publication reports. We took 13 samples by applying saturated sampling. Finally, we evaluated them using panel data regression analysis . Our results indicate that capital as scored by the CAR has a negative influence to Troubled Financing (NPF). Liquidity as scored by the FDR has no influence to NPF. Inflation has no influence to NPF. BI Repo Rate has no influence to NPF.

Keywords: capital; liquidity; inflation; BI Repo Rate; and NPF.

PENDAHULUAN

Moch. Hadi Santoso et.al (2018) mengungkapkan perbankan syariah salah satu sistem perbankan dengan potensi pertumbuhan memberi harapan besar. Hal ini ditunjukkan sejak tahun 1991 oleh lahirnya Bank Muamalat berikut empat belas Bank Umum Syariah.

Dasar penulisan adalah penelitian Restadila (2020) penelitian yang di lakukan pada tahun 2012-2016 menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah bank umum syariah (BUS) lebih buruk daripada bank konvensional dilihat dari rerata pembiayaan bermasalah bank syariah yang lebih besar. Yaitu sebesar 3,2% pada bank syariah dan sebesar 1,3% pada bank konvensional. Dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang BUS, memiliki kegiatan jasa dalam hilir-mudik pembayaran. Sehingga BUS berperan penting dalam pembiayaan. Wulandari et al. (2019) menyatakan pembiayaan adalah sebuah aktivitas yang menjadi sumber utama pendapatan bagi bank islam. Selain sumber pendapatan, pembiayaan juga sumber risiko operasi bisnis yang terbesar. Pembiayaan bermasalah mengurangi pendapatan, mengikis dana operasional dan likuiditas keuangan, selanjutnya merusak kesehatan bank syariah dan merugikan nasabah penyimpan (Trisadini Prasastinah Usanti, 2015 hlm.426).

Perusahaan perbankan harus mampu mengelola modalnya dengan baik. Kepercayaan masyarakat akan meningkat apabila bank memiliki modal yang cukup, sehingga bank tersebut mampu menahan potensi risiko kerugian yang akan dialami dari kegiatan operasional bank (Restadila, 2020).

Likuiditas menggambarkan bahwa bank bersedia dalam memberikan pinjaman berupa kredit kepada masyarakat. Perusahaan perbankan dapat menarik perhatian masyarakat dengan kemampuan memberikan pinjaman yang cukup besar kepada masyarakat (Restadila, 2020). Namun demikian, semakin banyak bank memberikan pinjaman kepada masyarakat maka potensi munculnya pembiayaan bermasalah akan semakin besar pula.

Inflasi memberikan tekanan pada perekonomian masyarakat, terutama pada debitur dalam hal kesulitan membayar angsuran pinjaman. Penurunan kemampuan pengembalian pembiayaan oleh debitur dapat memperbesar risiko pembiayaan (Hasanah, 2017).

kenaikan BI Repo Rate akan mengurangi DPK bank syariah dan akan menambah pembiayaan sehingga meningkatkan resiko pembiayaan bermasalah (Supriani & Sudarsono, 2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh permodalan, likuiditas, inflasi, bi repo rate terhadap pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Indonesia yang terdaftar didalam Otoritas Jasa Keuangan periode 2015-2019.

Kegunaan penelitian ini secara teoritis sebagai sarana informasi dan ilmu pengetahuan permodalan, likuiditas, inflasi, dan BI repo rate guna mengetahui faktor dan menekan tingkat pembiayaan bermasalah, Selain itu , penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis bagi perusahaan, nasabah, dan manajer keuangan. Bagi perusahaan untuk selalu memperhatikan faktor internal dan eksternal yang menyebabkan tingginya pembiayaan bermasalah. Bagi nasabah agar dapat mengetahui kemampuannya dalam manajemen bisnis. Sehingga pembiayaan bermasalah tidak meningkat. Bagi manajer keuangan dapat memberikan kontribusi kepada pihak manajemen untuk pengambilan keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kinerja keuangan guna dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah.

TINJAUAN PUSTAKA

Balancing Theory, Pecking Order Theory, dan Pembiayaan Bermasalah

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah pada balancing theory, Bank Umum Syariah mampu menyesuaikan keseimbangan antara pengembalian (return) atas pembiayaan yang diberikan dan risiko yang dihadapi jika debitur tidak dapat mengembalikan pembiayaan yang telah di berikan oleh BUS. Sehingga BUS dapat mengurangi risiko atau biaya dari pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Sehingga pembiayaan yang telah diberikan dapat diterima kembali dan menjadi keuntungan bagi BUS dan munculnya pembiayaan bermasalah pada BUS dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam pecking order theory pada pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah dapat dilihat pendanaan yang akan didahulukan penggunaannya (Siringoringo, 2012). Sumber pendanaan Bank Umum Syariah yaitu ekuitas, obligasi syariah, rekening giro, tabungan, investasi umum, dan investasi khusus. Sumberdana tersebut disalurkan dengan bentuk pembiayaan. Dari pembiayaan bermasalah Bank Umum syariah dalam pecking order mendahului pendanaan dari investor dan dari pihak penitip dana lalu diedarkan ke berbagai pelanggan bank dengan berbagai keperluan nasabah seperti, investasi, tambahan modal dan kegiatan konsumsi.

Pembiayaan Bermasalah

Wulandari et al. (2019) menyatakan tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio pembiayaan *Non Performing Financing* (NPF). Munifatussa'idah & Lestari (2019) menjelaskan NPF ialah rasio yang menjelaskan besarnya risiko pembiayaan di bank syariah. Risiko pembiayaan dikarenakan gagalnya debitur dalam membayar keharusan pada BUS sesuai akad pembiayaan di awal yang telah disepakatai kedua belah pihak. (IBI, 2018 hlm.93).

NPF terdapat dua jenis, yaitu NPF gross (tidak memperhitungkan PPAP) dan NPF net (memperhitungkan PPAP). Dalam penelitian ini, NPF yang pakai adalah NPF gross dikarenakan untuk melihat kerugian yang ditanggung oleh BUS akibat pembiayaan bermasalah tanpa melihat pencadangan yang dilakukan BUS.

Permodalan dan Pembiayaan Bermasalah

Menurut Wulandari et al. (2019) permodalan suatu perbankan tercermin pada rasio Capital Adequacy Ratio (CAR). CAR merupakan rasio yang menunjukkan perbankan syariah untuk dapat menyelubungi penyusutan aset akibat menderita rugi yang akibatkan oleh aset yang mmepunyai risiko pada saat menjalankan operasional bank. Tingginya CAR mampu menopang serta mengantisipasi perihal rugi asset produktif yang terdapat risiko, contohnya PYD.

Menurut Wulandari et al. (2019) peningkatan nilai CAR menunjukkan bahwa permodalan yang dimiliki oleh bank mengalami peningkatan, sehingga dapat menurunkan pembiayaan bermasalah. Keadaan itu menunjukkan tingginya rasio permodalan yang dimiliki maka bank makin mudah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah, sehingga dapat mengurangi nilai pembiayaan bermasalah (Makri, 2013). Hasil pengujian tersebut didukung oleh penelitian Wulandari et al. (2019), Nugrohowati & Bimo (2019), dan Akbar (2016) bahwa CAR mempunyai pengaruh negatif kepada NPF.

Likuiditas dan Pembiayaan Bermasalah

Didalam BUS likuiditas dapat dilihat dengan rasio financing to deposit ratio (FDR). Setiawan & Sherwin (2017) menyatakan FDR merupakan ialah rasio kesangupan suatu bank dalam mencukupi komitmen keuangan yang wajib terpenuhi, oleh karena itu ketika laju pertumbuhan FDR meningkat, mengindikasikan kecilnya kapasitas likuiditas bank yang bersangkutan sehingga rasio NPF meningkat. Tingginya suatu FDR memperlihatkan rndahnya kecukupan likuiditas suatu BUS (Loen & Ericson, 2008). Dalam hal ini bank

mampu mengelola PYD dan DPK tetap di posisi yang stabil. Ketika FDR naik, NPF akan turun. Likuiditas yang baik menunjukkan bank mempunyai kecukupan dana yang diperoleh dari nasabah dalam mencukupi segala kewajibannya. Tingginya suatu likuiditas BUS akan berdampak pada turunnya nilai NPF (Akbar, 2016).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (2015) batas bawah FDR (78%) dan batas atas (92%). Hasil pengujian tersebut didukung oleh penelitian Supriani & Sudarsono (2018), Munifatussa'idah & Lestari (2019), dan Wijoyo (2016) bahwa Likuiditas berpengaruh positif kepada pembiayaan bermasalah.

Inflasi dan Pembiayaan Bermasalah

Inflasi yaitu naiknya harga barang yang terus menerus. Naiknya harga tidak hanya terjadi pada satu atau dua barang tetapi secara keseluruhan. Inflasi juga merupakan keadaan pada saat harga-harga menjadi lebih mahal atau terjadinya kenaikan yang terjadi berkepanjangan (Hasanah, 2017).

Berdasarkan Purnamasari & Ramayanti (2020) Inflasi dapat memberikan pengaruh kepada kekayaan dan pendapatan riil di masyarakat dan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat terhadap produk. Jika daya beli turun maka pendapatan perusahaan akan menurun dan dapat terganggunya pembayaran pembiayaan dan berdampak pada kredit macet (Firdaus, 2015). Hasil pengujian tersebut didukung oleh penelitian Supriani & Sudarsono (2018) menyatakan inflasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

BI Repo Rate dan Pembiayaan Bermasalah

Setiawan & Sherwin (2017) BI Rate di perbankan syariah berperan sebagai pembanding. Nasabah yang ingin meminjam akan lebih memilih untuk mendapatkan bunga rendah, jika suku bunga bank konvensional mengalami peningkatan maka nasabah yang ingin meminjam akan mengambil pembiayaan pada BUS. Dalam kondisi tersebut, PYD bank syariah meningkat dan risiko pembiayaan juga meningkat.

BI Rate diperlukan sebagai penentuan nilai bagi hasil di BUS. Tingginya BI Rate dapat terjadi penurunan DPK BUS dikarenakan dapat mempunyai pengaruh pada bunga bank konvensional. Peristiwa tersebut, menyatakan jika BI Rate naik berdampak pada pembiayaan di BUS dikarenakan BUS lebih murah. Jika hal tersebut terjadi maka kemungkinan akan berdampak pada naiknya resiko pembiayaan bermasalah (Supriani & Sudarsono, 2018). Hasil pengujian tersebut didukung oleh penelitian Supriani & Sudarsono (2018), Najiatun et al. (2020), dan Hamzah (2018) bahwa BI Repo Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengukuran Variabel

Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen berupa pembiayaan bermasalah pengukurannya yaitu NPF gross. Dengan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Non Lancar}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Skala data variabel ini adalah rasio dengan satuan ukur persen.

Variabel Independen

a. Permodalan (X1)

Variabel permodalan menggunakan proksi *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR

dirumuskan sebagai berikut (Munifatussa'idah & Lestari, 2019):

$$CAR = \frac{\text{Modal Bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

ATMR = 12,5 x KPID.

KPID = $[\sum(GI_{1..n} \times \alpha)]n$

Dengan keterangan sebagai berikut:

KPID = beban modal Risiko Operasional menggunakan PID

GI = pendapatan bruto positif tahunan dalam tiga tahun terakhir

n= jumlah tahun dimana pendapatan bruto positif

α = 15% (lima belas perseratus)

Skala data variabel ini adalah rasio dengan satuan ukur persen.

b. Likuiditas (X2)

Dalam penelitian ini variabel likuiditas menggunakan proksi *Financing Deposit to Ratio* (FDR). FDR diumuskan:

$$FDR = \frac{\text{PYD}}{\text{DPK}} \times 100\%$$

Skala data variabel ini adalah rasio dengan satuan ukur persen.

c. Inflasi (X3)

Dalam penelitian ini menggunakan indikator persentase inflasi.

Inflasi dirumuskan sebagai berikut :

$$INF_n = \frac{\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}}{\text{IHK}_{n-1}} \times 100\%$$

Skala data variabel ini adalah rasio dengan satuan ukur persen.

d. BI Repo Rate (X4)

Dalam penelitian ini variabel BI Rate diukur dengan suku bunga BI. Dengan menggunakan satuan ukur persen.

Populasi dan Sampel

Populasinya yaitu Pebankan Syariah di Indonesia yang terdiri dari BUS dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. Sampelnya yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia. Peneliti menggunakan teknik sampling berupa *puspositive sampling*.

Sampelnya yaitu 14 BUS di Indonesia tahun 2015-2019. Dan dipatkan perolehan 70 sampel selama 5 tahun.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data didalam penelitian memergunakan data kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data Sekunder diperoleh langsung melalui situs BI dan OJK, berupa annual report BUS periode 2015 –2019.

Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah menggunakan bantuan program komputer yaitu Microsoft excel 2013 dan Eviews v 11.0. Sehingga menghasilkan model regresi data panel yang digunakan yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

Y = Pembiayaan Bermasalah diukur (NPF)

α = Konstanta

β (1,2,3,4) = Koefisien regresi masing-masing variabel independen

X1 = Permodalan diukur (CAR)

X2 = Likuiditas diukur (FDR)

X3 = Inflasi

X4 = BI Repo Rate

ϵ = Error term

i = Nama Perusahaan (Nama Bank Umum syariah)

t = Periode waktu

3 model pada regresi data panel (Basuki & Prawoto, 2017) yaitu *Pooled Least Square* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Menurut Basuki & Prawoto (2017) dibutuhkan model yang tepat untuk digunakan dengan melakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis yang berisikan secara parsial (Uji t) dan uji koefisien determinasi (R²) dengan memakai nilai adjusted R² untuk mengetahui model regresi terbaik (Ghazali, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Daftar BUS di Otoritas Jasa Keuangan

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1	BAS	Bank Aceh Syariah
2	BNTBS	BPD Nusa Tenggara Barat Syariah
3	BMI	Bank Muamalat Indonesia
4	BVS	Bank Victoria Syariah
5	BBRIS	Bank Rakyat Indonesia Syariah
6	BJBS	Bank Jabar Banten Syariah
7	BBNIS	Bank Negara Indonesia Syariah
8	BSM	Bank Syariah Mandiri
9	BMS	Bank Mega Syariah
10	BPDS	Bank Panin Dubai Syariah
11	BSB	Bank Syariah Bukopin
12	BBCAS	Bank Central Asia Syariah
13	BTPNS	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

Sumber: www.ojk.go.id (2021)

Analisis Statistik Deskriptive

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Pembiayaan				
	Bermasalah	Permodalan	Likuiditas	Inflasi	BIRepoRate
Mean	4.113846	21.19846	87.05908	3.166000	5.500000

Median	3.300000	19.44000	89.00000	3.130000	5.000000
Maximum	22.04000	44.60000	104.7500	3.610000	7.500000
Minimum	0.320000	11.51000	68.64000	2.720000	4.250000
Std. Dev.	3.747845	7.543715	8.922104	0.303180	1.160044

Sumber : e-views v.11 (2021)

Dari analisis statistik deskriptif di atas diketahui :

a. Variabel Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Rata - rata NPF dari 13 BUS di Indonesia selama 5 tahun periode 2015-2019 adalah 4,11% hasil tersebut. Hal ini dapat menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan non lancar dari PYD oleh BUS di Indonesia terhadap total pembiayaan dari 13 BUS di OJK tahun 2015-2019 rata-rata hampir semua Bank Umum Syariah sama baik karena rata-ratanya di bawah 5% atau rata-rata keseluruhan pembiayaan bermasalah sebesar 4,11% lebih kecil dari ketentuan No. 18/14/PBI/2016 maksimal sebesar 5%.

NPF terendah dialami oleh BCA Syariah sebesar 0,32% dalam kriteria penilaian *Non Performing Financing* (NPF) di tahun 2017, hal tersebut dikarenakan pembiayaan pada tahun 2016 Rp. 3.462,8 Miliar mengalami pertumbuhan sebesar 19,3% pada tahun 2017, sehingga pembiayaan pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 4.191,1 Miliar dan hal tersebut di barengi dengan pertumbuhan pembiayaan non lancar pada tahun 2016 Rp. 6,71 Miliar mengalami penurunan sebesar 5,48% menjadi sebesar (Rp. 30,09 Miliar) sehingga pertumbuhan pembiayaan yang disalurkan lebih besar dari pertumbuhan (penurunan) pembiayaan non lancar dan membuat pembiayaan bermasalah tetap rendah.

NPF tertinggi yaitu Bank BJB Syariah di tahun 2017 (22,04%), dikarenakan Bank BJB Syariah mengalami perlambatan di tahun 2017 yang disebabkan oleh kenaikan piutang sebesar 3% di tahun 2016 sejumlah Rp. 4.246,91 Miliar mejadi Rp. 4.374,47 Miliar sehinga total asset juga mengalami kenaikan dan hal tersebut juga dikarenakan pembiayaan yang diberikan pada tahun 2017 sejumlah Rp. 5.447,52 Miliar dan di tahun 2016 Rp. 5.414,13 Miliar mengalami kenaikan sebesar 0,62%. Maka kenaikan piutang > kenaikan pembiayaan yang membuat pembiayaan bermasalah meningkat dikarenakan piutang tersebut dapat ditagih atau tidak. Standard deviasi pembiayaan bermasalah (NPF) sebesar 3,75% < rata-rata artinya tidak terdapat variasi atau kesenjangan yang besar pada NPF antara peringkat tertinggi dan peringkat terendah.

b. Variabel Permodalan (CAR)

Rata – rata CAR dari 13 BUS selama 5 tahun yaitu 2015-2019 adalah 21,20%. Keadaan ini mengindikasikan rata – rata CAR dalam BUS mengalami keadaan yang baik dan masih berada pada batas minimal, menurut No. 11/POJK.03/2016 tentang KPMM bahwa batas ketentuan CAR yang harus dimiliki Bank adalah 8%.

CAR terendah dialami oleh Panin Dubai Bank Syariah sebesar 11,51% pada tahun 2017, meskipun menjadi yang terendah tetapi rasio CAR Panin Dubai Bank Syariah tetap ada diatas ketentuan oleh BI adalah min. 8%. CAR Panin Dubai Bank Syariah mengalami penurunan sebesar 36,65% dibandingkan dengan CAR tahun 2016 sebesar 18,17%. Keadaan ini dikarenakan terdapat adanya penurunan total modal Panin Dubai Bank Syariah dari tahun 2016 Rp. 1.187.940.719 menjadi Rp. 274.196.365 di tahun 2017. Hal tersebut juga dapat membandingkannya terhadap total ATMR pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.463.807.132, dan pada tahun 2017 Rp. 6.005.075.773.

Sedangkan, CAR tertinggi dialami oleh BTPN Syariah tahun 2019 sebesar 44,6%. Besarnya CAR pada BTPN Syariah disebabkan total modal BTPN Syariah terdapat kenaikan 35% dari tahun 2018 sebesar Rp. 3.997 Miliar menjadi Rp. 5.393 Miliar pada tahun 2019. Hal tersebut juga dapat membandingkannya terhadap total ATMR di tahun 2018 sejumlah Rp. 3,6 Triliun dan di 2019 sejumlah Rp. 4,7 Triliun. Standar deviasi

Permodalan (CAR) sebesar 7,54% < rata-rata artinya terdapat variasi atau kesenjangan yang kecil pada CAR antara peringkat tertinggi dan peringkat terendah.

c. Variabel Likuiditas

Rerata FDR 13 BUS di Indonesia selama 5 tahun yaitu 2015-2019 adalah 87,06%. Berdasarkan PBI No. 18/14/PBI/2016 rata-rata FDR ada di tingkat yang baik karena berada pada batas bawah dan batas atas sebesar 80%-92%.

BUS yang berada di atas rerata FDR yaitu BBNI (2015), BMI dan BVS (2015 dan 2016), BPDS, NTBS dan BSB (2015, 2016, 2018, dan 2019), dan BBCAS, BTPNS, BMS, dan BJBS (2015 – 2019). FDR terendah dialami oleh Bank Aceh Syariah pada tahun 2019 sejumlah 68,64%. Keadaan ini dikarenakan jumlah PYD untuk masyarakat dalam penyaluran kredit tumbuh sebesar 8,51%, pada tahun 2018 pembiayaan sebesar Rp. 13,23 Triliun menjadi 14,36 Triliun pada tahun 2019. Dengan membandingkan terhadap total DPK mengalami kenaikan sejumlah 12,20%, pada tahun 2018 Dana Pihak Ketiga sebesar Rp. 18,38 Triliun menjadi 20,92 Triliun pada tahun 2019. Artinya Likuiditas Bank Aceh Syariah masih cukup tinggi dikarenakan penyaluran kredit masih di bawah standar Bank Indonesia sebesar 80%-92%.

FDR tertinggi yaitu Bank BJB Syariah pada tahun 2015 sebesar 104,75%. Hal tersebut dikarenakan Bank BJB Syariah mengalami peningkatan pembiayaan sebesar 13,29% dibandingkan tahun 2014 dan dengan membandingkan DPK yang mengalami kenaikan pembiayaan sebesar 1,74% dibandingkan tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat bahwa kenaikan pembiayaan > kenaikan DPK sehingga rasio FDR besar. Artinya Likuiditas Bank BJB Syariah sangat rendah dikarenakan berada di atas batas atas standar yang ditentukan BI sejumlah 80%-92%. Standar deviasi Likuiditas (FDR) sebesar 87,06% < rata-rata artinya tidak terdapat variasi atau kesenjangan yang besar antara peringkat tertinggi FDR dan peringkat terendah FDR.

d. Variabel Inflasi

Rata-rata inflasi selama 5 tahun yaitu 2015-2019 adalah 3,16%. Inflasi terendah berada pada tahun 2019 sebesar 2,92% berada pada tingkat inflasi ringan. Hal tersebut dikarenakan IHK tahun 2019 sebesar 139,07 dan dikurangi IHK tahun 2018 sejumlah 135,39, dengan membandingkan IHK pada tahun 2018 sebesar 135,39. Artinya, Inflasi pada periode tersebut ringan, karena peningkatan harga yang relatif perlahan-lahan pada tahun tersebut dan terhadap perekonomian suatu negara tidak memiliki efek besar dan mudah untuk dikendalikan. Inflasi tertinggi berada pada tahun 2017 sebesar 3,61% berada pada tingkat inflasi ringan. Hal tersebut dikarenakan IHK tahun 2017 sebesar 131,28 dan dikurangi IHK tahun 2016 sebesar 126,71, dengan membandingkan IHK tahun 2016 sebesar 126,71. Artinya, walaupun pada periode 2015-2019 Inflasi berada pada nilai tertinggi tetapi Inflasi pada periode tersebut tergolong inflasi ringan dikarenakan kenaikan harga terjadi begitu perlahan-lahan dan melanjut perlahan-lahan pada tahun tersebut dan terhadap perekonomian suatu negara tidak memiliki efek besar dan mudah untuk dikendalikan. Standar deviasi Inflasi sebesar 0,30% < rata-rata artinya terdapat variasi atau kesenjangan yang kecil antara peringkat tertinggi inflasi dan peringkat terendah inflasi.

e. Variabel BI Repo Rate

Rata-rata BI Repo Rate selama 5 tahun yaitu 2015-2019 adalah 5,5%. BI Repo Rate terendah pada tahun 2017 sebesar 4,25%. Hal tersebut menurut Bank Indonesia No. 19/64/DKkom dikarenakan adanya pelonggaran kebijakan moneter dengan rendahnya realisasi, serta terkendalinya defisit transaksi berjalan dalam batas aman. BI Repo Rate tertinggi pada tahun 2015 sebesar 7,5%. Hal tersebut dikarenakan menurut Bank Indonesia No. 17/5/DKkom yaitu untuk mengarahkan inflasi ke sasaran 4+-1% di tahun 2015 dan 2016, dan mendukung pengendalian defisit ke tingkat lebih sehat. Standar deviasi BI Repo

Rate sebesar 1,16% artinya tidak terdapat variasi atau kesenjangan yang besar antara peringkat tertinggi BI Repo Rate dan peringkat terendah BI Repo Rate.

Analisis Regresi Data Panel

a. Uji F Restricted

Tabel 3. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.121376	(12,48)	0.0025
Cross-section Chi-square	37.492433	12	0.0002

Sumber : Output E-Views v.11. (2021)

Berdasarkan tabel 3, nilai probabilitas Cross Section Chi-Square sejumlah $0.0002 < 0.05$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan hasilnya yang sesuai untuk digunakan antara PLS dan FEM adalah FEM.

b. Uji Hausman

Tabel 4. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	5.891149	4	0.2074

Sumber : Output E-Views v.11. (2021)

Berdasarkan tabel 4, didapat hasil probabilitas sebesar $0,2074 > 0,05$ yang menyatakan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak maka model yang terpilih adalah REM. Dikarenakan antara hasil Uji Chow dan Uji Hausman mendapatkan hasil yang berbeda maka diperlukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan Uji *Lagrange Multiplier*.

c. Uji Lagrange Multiplier

Tabel 5. Hasil Uji *Lagrange Multiplier*

	Test Hypothesis		
	Cross-section	Time	Both
Breusch-Pagan	5.801376 (0.0160)	2.386550 (0.1224)	8.187925 (0.0042)

Sumber : Output E-Views v.11. (2021)

Dalam tabel 5, dapat dilihat jika nilai *cross section* untuk Uji *Lagrange Multiplier* sebesar $0,0160 < 0,05$. Maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, dan model yang paling cocok antara PLS dan REM yaitu REM.

Model Regresi Data Panel

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan menyatakan model estimasi yang sesuai dan tepat untuk dipergunakan didalam penelitian ini adalah Random Effect Model (REM).

Tabel 6. Hasil Model Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.135783	5.857177	-0.364644	0.7167
PERMODALAN	-0.167493	0.063632	-2.632191	0.0108
LIKUIDITAS	0.071909	0.052479	1.370237	0.1757
INFLASI	2.162132	1.150878	1.878680	0.0651
BIREPORATE	-0.600983	0.320729	-1.873801	0.0658

Sumber : Output E-Views v.11. (2021)

Pada tabel 6, ditulis persamaan model regresi data panel dengan menerangkan pengaruh Permodalan, Likuiditas, Inflasi, dan BI Repo Rate kepada Pembiayaan Bermasalah yang melalui NPF pada BUS di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019 yaitu :

$$NPF = -2.135783 - 0.167493\text{Permodalan} + 0.071909\text{Likuiditas} + 2.162132\text{Inflasi} - 0.600983\text{BIRepoRate}.$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai C sebesar -2.135783 artinya apabila variabel independen pada regresi yaitu Permodalan, Likuiditas, Inflasi, dan BI Repo Rate bernilai 0 (nol), maka NPF pada BUS adalah sebesar -2.135783 satuan.
- b. Koefisien regresi Permodalan yang dinyatakan dengan CAR menunjukkan arah negatif yaitu sejumlah -0.167493. Setiap terjadinya peningkatan Permodalan sejumlah satu dengan dugaan variabel lain bernilai 0, maka NPF akan terjadi penurunan sejumlah -0.167493 satuan. Keadaan itu dapat dikatakan koefisien bernilai negatif, artinya antara Permodalan dan NPF memiliki hubungan negatif. Maka, setiap Permodalan meningkat akan menyebabkan NPF meningkat pada BUS.
- c. Koefisien regresi Likuiditas yang dinyatakan dengan FDR menunjukkan arah positif yaitu sebesar 0.071909. Setiap terjadinya peningkatan FDR sejumlah satu dengan asumsi variabel lain berjumlah nol, maka NPF akan meningkat sebesar 0.071909 satuan. Hal ini dapat dikatakan koefisien bernilai positif, artinya antara FDR dan NPF memiliki hubungan (+). Maka, setiap FDR meningkat akan menyebabkan NPF meningkat pada BUS.
- d. Koefisien regresi Inflasi menunjukkan arah positif yaitu sebesar 2.162132. jika terjadi kenaikan Inflasi sebanyak satu dengan dugaan variabel lain berjumlah nol, maka NPF akan menurunkan sebanyak 2.162132. Keadaan itu dapat dikatakan koefisien bernilai positif, artinya antara Inflasi dan NPF memiliki hubungan positif. Maka, setiap inflasi meningkat akan menyebabkan NPF meningkat pada BUS.
- e. Koefisien BI Repo Rate menunjukkan arah negatif yaitu sebesar -0.600983. Setiap terjadinya peningkatan BI Repo Rate sebanyak satu dengan dugaan variabel lain berjumlah nol, maka NPF akan menurunkan sebanyak -0.600983. Keadaan itu dapat dikatakan koefisien bernilai negatif, artinya antara BI Repo Rate dan NPF terdapat ikatan negatif. Maka, setiap BI Repo Rate meningkat akan menyebabkan NPF meningkat pada BUS.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji t (Parsial)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2.135783	5.857177	-0.364644	0.7167
PERMODALAN	-0.167493	0.063632	-2.632191	0.0108
LIKUIDITAS	0.071909	0.052479	1.370237	0.1757
INFLASI	2.162132	1.150878	1.878680	0.0651
BIREPORATE	-0.600983	0.320729	-1.873801	0.0658

Sumber : Output E-Views v.11. (2021)

Berdasarkan tabel 7, diketahui pengaruh diantara variabel bebas kepada variabel terikat:

- a. Pengaruh Permodalan (CAR) kepada Pembiayaan Bermasalah (NPF).

Didapat hasil Permodalan (CAR) menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari α , $0.0108 < 0,05$ dengan nilai t-hitung $> t$ -tabel yaitu $-2.632191 < -2.000298$ dengan $df = 65 - 5 = 60$ dan taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat diartikan bahwa Permodalan (CAR) mempunyai pengaruh (-) kepada Pembiayaan Bermasalah (NPF) dan menunjukkan hipotesis terbukti.

- b. Pengaruh Likuiditas (FDR) terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF).

Didapat hasil Likuiditas FDR menunjukkan hasil signifikan lebih besar dari α , $0.1757 > 0.05$ dengan nilai t-hitung $< t$ -tabel yaitu $1.370237 < 2.000298$ dengan $df = 65 - 5 = 60$ dan taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dan didapat

diartikan bahwa Likuiditas (FDR) tidak mempunyai pengaruh kepada Pembiayaan Bermasalah (NPF) dan menunjukkan hipotesis tidak terbukti.

c. Pengaruh Inflasi kepada Pembiayaan Bermasalah (NPF).

Didapat hasil Inflasi menunjukkan hasil signifikan $> \alpha$, $0.0651 > 0.05$ dengan nilai t-hitung $< t$ -tabel yaitu $1.878680 < 2.000298$ dengan $df = 65 - 5 = 60$ dan taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dan didapat diartikan bahwa Inflasi tidak mempunyai pengaruh kepada Pembiayaan Bermasalah (NPF) dan menunjukkan hipotesis tidak terbukti.

d. Pengaruh BI Repo Rate kepada Pembiayaan Bermasalah (NPF).

Didapat hasil BI Repo Rate menunjukkan hasil signifikan $> \alpha$, $0.0658 > 0.05$ dengan nilai t-hitung $< t$ -tabel yaitu $1.873801 < 2.000298$ dengan $df = 65 - 5 = 60$ dan taraf signifikansi 5% atau 0,05, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dan didapat diartikan bahwa BI Repo Rate tidak berpengaruh kepada Pembiayaan Bermasalah (NPF) dan menunjukkan hipotesis tidak terbukti.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Root MSE	2.728896	R-squared	0.180783
Mean dependent var	2.481241	Adjusted R-squared	0.126168
S.D. dependent var	3.038465		

Sumber : Output E-Views v.11. (2021)

Berdasarkan tabel 8, nilai *Adjusted R-Squared* sejumlah 0.126168 atau 12,61% artinya nilai *Adjusted R-Squared* bahwa 12,62% variabel terikat yaitu Pembiayaan Bermasalah dapat dijelaskan 4 variabel bebas yaitu Permodalan, Likuiditas, Inflasi, dan BI Repo Rate, sisanya 87,38% dari varians Pembiayaan bermasalah dapat dijelaskan oleh faktor lain.

Pembahasan

Pengaruh Permodalan (CAR) Terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Hasil Pengujian dari Permodalan (CAR) terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) adalah berpengaruh. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa apabila nilai Permodalan meningkat, maka Pembiayaan Bermasalah yang dicapai oleh BUS Indonesia akan menurun, begitupun sebaliknya. Hubungan negatif antara Permodalan (CAR) terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) dapat terjadi karena bank selalu berusaha mengoptimalkan modal yang dimilikinya untuk memenangkan persaingan.

Hasil analisis (Aryani et al., 2016) menyatakan CAR mempunyai pengaruh negatif kepada NPF. Karena, tingginya suatu CAR akan berdampak pada tinggi jumlah modal yang dipergunakan untuk mencegat resiko tidak terbayarnya pembiayaan. CAR mempunyai pengaruh negatif kepada NPF dengan asumsi kenaikan CAR disertai dengan naiknya modal bank dan turunnya ATMR. Nilai ATMR yang kecil menandakan bahwa kemampuan bank untuk mencegat risiko dari setiap pembiayaan atau aset produktif berada dalam risiko atau akan meningkatkan pembiayaan bermasalah. ATMR rendah salah satu faktornya yaitu pembiayaan bermasalah yang rendah. Jika ATMR rendah maka modal akan meningkat dan CAR akan mengalami kenaikan.

Hal tersebut menandakan permodalan yang diproyeksikan dengan CAR mampu dapat menyelubungi semua resiko usaha yang terjadi pada BUS, dan juga resiko kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Jadi, ketika CAR meningkat maka akan mengurangi risiko pembiayaan bermasalah yang diproyeksikan dengan NPF.

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitaian sebelumnya yang menjelaskan bahwa Permodalan (CAR) mempunyai pengaruh (-) dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) yaitu (Nugrohowati & Bimo, 2019), (Aryani et al., 2016), (Muhammad et al., 2020),

(Wulandari et al., 2019), (Purnamasari & Ramayanti, 2020), (Fitriyanto, 2018), dan (Nihayah & Walyoto, 2020). Analisis ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Supriani & Sudarsono, 2018), (Sugiharto et al., 2019) dan (Rahmah & Armina, 2020) menjelaskan bahwa Permodalan (CAR) berpengaruh positif dan signifikan kepada Pembiayaan Bermasalah (NPF).

Pengaruh Likuiditas (FDR) Terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Hasil analisis menunjukkan bahwa besar kecilnya likuiditas (FDR) tidak mempunyai pengaruh kepada NPF di sektor BUS di Otoritas Jasa Keuangan. Artinya, bagaimanapun keadaan likuiditas, ketika mengalami kenaikan atau penurunan tidak mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Karena, tinggi atau rendahnya PYD oleh BUS tidak berkaitan pada besarnya FDR, tetapi bergantung dari investasi terikat dan tidak terikat serta modal bank.

Munifatussa'idah & Lestari (2019) menyatakan penyebab pembiayaan bermasalah adalah faktor ekonomi yang semakin tidak baik, tidak baiknya ekonomi maka akan mengakibatkan pada bisnis debitur. Sehingga, jika BUS terdapat rasio FDR yang lumayan tinggi maka bank tersebut dikatakan tidak likuid karena hampir seluruh dana yang diperoleh BUS dipergunakan untuk pembaiayaan. Dan juga FDR tidak mempunyai pengaruh kepada pembiayaan bermasalah karena FDR hanya menggambarkan sebaik-baiknya BUS dalam pemanfaatan dana yang diperoleh dari nasabah yang berupa penyaluran pembiayaan agar mendapatkan keuntungan, dan selanjutnya menjadi kewajiban dalam waktu singkat bank untuk mengembalikan dana kembali kepada nasabah bilamana nasabah menarik dananya kembali.

Hasil analisis sejalan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh (Muhammad et al., 2020) dan (Damanhur et al., 2017) yang menyatakan bahwa Likuiditas tidak mempunyai pengaruh kepada Pembiayaan Bermasalah (NPF). Hasil analisis tidak sejalan dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh (Supriani & Sudarsono, 2018), (Pradana, 2018), (Aryani et al., 2016), dan (Nihayah & Walyoto, 2020) yang menyatakan bahwa Likuiditas mempunyai pengaruh positif kepada Pembiayaan Bermasalah (NPF). Dan penelitain ini juga tidak sejalan Likuiditas mempunyai pengaruh negatif kepada Pembiayaan Bermasalah (NPF) yang dilakukan oleh (Vanni & Rokhman, 2018), (Sugiharto et al., 2019), (Wulandari et al., 2019), (Setiawan & Sherwin, 2017), (Rahmah & Armina, 2020), dan (Purnamasari & Ramayanti, 2020).

Pengaruh Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar kecilnya Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) pada sektor Bank Umum Syariah di Otoritas Jasa Keuangan. Vanni & Rokhman (2018) mengutip bahwa jika harga barang secara umum naik dan tidak dibarengi dengan naiknya pendapatan maka masyarakat akan melakukan pinjaman kepada BUS untuk memenuhi kebutuhannya. Tetapi, pengajuan pinjaman tidak akan mudah untuk dikabulkan oleh BUS. Karena, BUS harus dapat melihat secara cermat asal usul peminjam sebelum meyakati pembiayaan dan dapat dilihat bahwa keadaan inflasi pada tahun 2015 – 2019 berada pada inflasi ringan sehingga inflasi tidak akan berpengaruh terhadap naik atau turunnya pembaiayaan bermasalah (Halim, 2015: 14).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Vanni & Rokhman, 2018), (Najiatun et al., 2020), (Hamzah, 2018), (Amanah, 2019), dan (Hasanah, 2017) yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nugrohowati & Bimo, 2019), (Pradana, 2018), (Zannati & Hendryadi, 2019), (Sugiharto et al., 2019), (Lidyah, 2016) dan (Purnamasari & Ramayanti, 2020) yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap

Pembiayaan Bermasalah (NPF). Dan hasil penelitian yang menyatakan bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) yaitu (Damanhur et al., 2017) dan (Rustika, 2016), serta yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF) yaitu (Supriani & Sudarsono, 2018) dan (Fitriyanto, 2018).

Pengaruh BI Repo Rate Terhadap Pembiayaan Bermasalah (NPF)

BI Repo Rate ialah kebijakan dari BI untuk membuat penguatan pada kerangka operasi monete yang sebelumnya hanya BI Rate. Amanah (2019) mengutip BI Rate adalah hal penting pada aktifitas bank yaitu suku bunga kredit dan simpanan. Tinggi atau rendahnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi keduanya (Kasmir, 2012 hlm.155).

Rustika (2016) menyatakan BI Repo Rate bagi BUS hanya pembandingan. Ketika terjadi kenaikan, akan mengakibatkan tingginya daya saing BUS. Dengan peningkatan tersebut maka BUS mengharapkan produk pembiayaan lebih kompetitif. Tetapi kenyataannya, naiknya suku bunga tidak selalu adanya peningkatan pembiayaan. Karena, pengaruh BI Repo Rate kepada NPF BUS dipengaruhi oleh akad. Akad tersebut didominasi oleh akad murabahah dengan prinsip jual beli murabahah, pendapatan bersifat tetap (Wahyudi, dkk, 2013). Pembiayaan dengan bagi hasil bergantung pada untung/rugi debitur, ketika debitur mengalami kerugian bank syariah tidak akan mendapatkan bagi hasil dan justru dapat pula menanggung risiko kerugian bersama debitur atau mentrasfer risiko tersebut kepada nasabah jadi bank syariah tidak menanggung sendirian. Selain itu dikarenakan jangka waktunya karena jangka waktu pembiayaan bersifat menengah atau jangka panjang (lebih dari 1 tahun).

Hasil analisis sejalan dengan penelitian sebelumnya (Supriani & Sudarsono, 2018) yang mengungkapkan dalam waktu singkat BI Repo Rate tidak mempunyai pengaruh kepada pembiayaan bermasalah (NPF). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nugrohowati & Bimo, 2019), (Najiatun et al., 2020), (Hamzah, 2018), (Sugiharto et al., 2019), (Aryani et al., 2016), (Lidyah, 2016), (Hasanah, 2017) dan (Setiawan & Sherwin, 2017) yang menyatakan bahwa BI Repo Rate mempunyai pengaruh (+) kepada Pembiayaan Bermasalah (NPF).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka didapat suatu kesimpulan bahwa hasil penelitian telah membuktikan bahwa dari pengujian variabel Permodalan (CAR) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan Bermasalah yang diukur dengan Pembiayaan Bermasalah (NPF). Hasil penelitian telah membuktikan bahwa dari pengujian variabel Likuiditas (FDR) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah yang diukur dengan Pembiayaan Bermasalah (NPF). Hasil penelitian telah membuktikan bahwa dari pengujian variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah yang diukur dengan Pembiayaan bermasalah (NPF). Hasil penelitian telah membuktikan bahwa dari pengujian variabel BI Repo Rate tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Bermasalah yang diukur dengan Pembiayaan bermasalah (NPF).

DAFTAR PUSTAKA

- Adlan, M. A. (2016). PENYELESAIAN KREDIT MACET PERBANKAN DALAM PANDANGAN ISLAM Tinjauan Regulasi Kasus Kredit Macet akibat Bencana Alam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2). <https://doi.org/10.21274/an.2016.2.2.145-186>
- Akbar, D. A. (2016). Inflasi, Gross Domesctic Product (Gdp), Capital Adequacy Ratio (Car),

- Dan Finance To Deposit Ratio (Fdr) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *I-Economics*, 2(2), 19–37.
- Amanah, T. (2019). Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, Bi Rate, Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi Islam. In *Raden Intan Repository* (Vol. 53, Issue 9, pp. 1689–1699). <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8165>
- Aryani, Y., Anggraeni, L., & Wiliasih, R. (2016). Faktor-faktor yang Memengaruhi Non Performing Financing pada Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014. In *Al-Muzara'ah* (Vol. 4, Issue 1, pp. 44–60). <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.44-60>
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2017). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi & Bisnis : Dilengkapi Aplikasi SPSS & EIEWS*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Damanhur, Albra, W., Syammi, G., & Habibie, M. (2017). *What is The Determinant of Non-performing Financing in Branch Sharia Regional Bank in Indonesia*. 1, 265–271.
- Destiana, R. (2018). *Determinan pembiayaan bermasalah pada bank syariah di indonesia*. 4, 53–63.
- Fitriyanto, A. F. (2018). *PENGARUH FAKTOR INFLASI , NILAI TUKAR RUPIAH , CAPITAL ADEQUACY RATIO , DAN FINANCING TO DEPOSIT RATIO TERHADAP NON PERFORMING FINANCING PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2013-2017 PENGARUH FAKTOR INFLASI , NILAI TUKAR RUPIAH , CAPITAL ADE*.
- Ghazali, I. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghazali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hamzah, A. (2018). Journal of Islamic Finance and Accounting. In *Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing* (Vol. 1, Issue 1, pp. 63–76).
- Hasanah, U. U. (2017). *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Dan Nilai Tukar Terhadap Non Performing Financing*.
- Jusrizal, & H, A. (2015). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Struktur Modal Pada Perusahaan Property Dan Real Estate. In *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya* (Vol. 17, Issue 1, pp. 1–7).
- Kuangan, S. E. O. J. (2016). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 42/SEOJK.03/2016*.
- Lestari, D. Y., Tristiarto, Y., & Siswantini, T. (2019). *Faktor-Faktor Determinan Profitabilitas Bank Umum Konvensional di Bursa Efek Indonesia*.
- Lestari, S. (2015). Determinan Struktur Modal dalam Perspektif Pecking Order Theory dan Agency Theory (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Listing di BEI Tahun 2011-2013). *Jurnal WRA*, 3(1), 571–590.
- Lidyah, R. (2016). *DAMPAK INFLASI , BI RATE , CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR), BIAYA OPERASIONAL PENDAPATAN OPERASIONAL (BOPO) TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK*. 2(1), 1–19.
- Muhammad, R., Suluki, A., & Nugraheni, P. (2020). *Internal Factors and non-performing financing in Indonesian islamic rural banks*. 7, 1–12.
- Munifatuss'idah, A., & Lestari, S. S. (2019). Determinan Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9, 1689–1699.
- Najiatun, Sanusi, M., Rahman, M., & Herianingrum, S. (2020). Analisis Variabel Makroekonomi Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia. In *Jurnal Ekonomi* (Vol. 24, Issue 3, p. 335). <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.597>
- Nihayah, A. Z., & Walyoto, S. (2020). Identification of Non Performing Alteration Measured

- by Microeconomic Variable Sharia Banking. *GATR Journal of Finance and Banking Review*, 5(1), 23–38. <https://doi.org/10.35609/jfbr.2020.5.1>
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. In *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* (Vol. 5, Issue 1, pp. 42–49). <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>
- Peraturan Bank Indonesia. (2008). *Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008*.
- Peraturan Bank Indonesia. (2015). *PBI No. 17/11/PBI/2015*.
- Peraturan Bank Indonesia. (2018). *Peraturan Bank Indonesia No. 20/8/PBI/2018*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014*.
- Pradana, M. N. R. (2018). Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah. In *Eksis* (Vol. 13, Issue 2, pp. 131–144). <https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/001/issue/view%0AHalaman>
- Purnamasari, K., & Ramayanti, T. P. (2020). The Effects of Macroeconomic and Bank Specific Factors on Nonperforming Financing in Sharia Commercial Bank in Indonesia. In *Global Review of Islamic Economics and Business* (Vol. 7, Issue 2, p. 081). <https://doi.org/10.14421/grieb.2019.072-03>
- Rahmah, A. Z., & Armina, S. H. (2020). Macro and micro determinants of the non-performing finance: The case of Indonesian Islamic bank. In *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* (Vol. 6, Issue 1, pp. 34–41). <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art4>
- Restadila, C. (2020). Analisis Determinan Profitabilitas Perbanka Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Rohmana, Y. (2010). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi dengan Eviews*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Ekonomi dan Koperasi.
- Rustika, F. D. (2016). *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Acuan (BI Rate), Nilai Tukar Rupiah, GDP Terhadap NPF Perbankan Syariah*.
- Setiawan, C., & Sherwin, S. M. (2017). *Banks Efficiency and the Determinants of Non-Performing Financing of Full-Fledged Islamic Banks in Indonesia*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/htbmy>
- Siringoringo, R. (2012). Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia. In *Karakteristik Dan Fungsi Intermediasi Perbankan Di Indonesia* (pp. 61–81).
- SUCIATI. (2014). *Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Likuiditas, Rentabilitas, Dan Solvabilitas Perbankan Syariah Pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Periode 2011-2013*. 10.
- Sugiharto, R. B., Nuryartoro, N., & Effendi, J. (2019). Determinan Non Performing Financing (Npf) Pada Segmen Business Banking (Studi Kasus Di Pt Bank Syariah X). In *Journal of Management Review* (Vol. 3, Issue 1, p. 291). <https://doi.org/10.25157/jmr.v3i1.1807>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriani, I., & Sudarsono, H. (2018). *Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro Terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia*. 6, 1–18.
- Surat Edaran Bank Indonesia. (2011). *Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP/2011*. Bank Indonesia.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 8/SEOJK.03/2015*.
- Vanni, K. M., & Rokhman, W. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non

- Performing Financing Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Tahun 2011-2016. In *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 5, Issue 2, p. 306). <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v5i2.2776>
- Wijoyo, S. (2016). *ANALISIS FAKTOR MAKROEKONOMI DAN KONDISI SPESIFIK BANK SYARIAH TERHADAP NON-PERFORMING FINANCE (Studi Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Yang Ada di Indonesia Periode 2010 : 1- AN ANALYSIS OF MACROECONOMIC FACTORS AND SPECIFIC CONDITIONS OF SH. 5(3), 513–525.*
- Wulandari, M. V., Suryana, & Utami, S. A. (2019). *Determinant of Non-performing Financing in Indonesia Islamic Bank.* 453–468.
- Zannati, R., & Hendryadi. (2019). *Determinan Non Performing Financing Perbankan Syariah: Prespektif Makro Ekonomi* (Vol. 1, Issue 3, pp. 91–100).